

**KAJIAN PENDAPATAN NON HALAL DAN DAMPAK PENGGUNAANNYA
TERHADAP REPUTASI DAN KEPERCAYAAN
NASABAH PERBANKAN SYARIAH
(Study Empiris Pada Bank Muamalat)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

OLEH

HUZAIN SHOLEH UTOMO
10800111054

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Huzain Sholeh Utomo
Nim : 10800111054
Tempat/Tgl Lahir : Ujung pandang, 20-November-1992
Jurusan : Akuntansi
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam/Strata 1 (S1)
Alamat : Jl. Bitowa 1 no.35 Blok 3 Perumnas Antang
Judul : Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak
Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan
Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank
Muamalat)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, April 20017
Penulis,

Huzain Sholeh Utomo
NIM. 10800111054



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I Jl. Slt Alauddn Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923

Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Huzain Sholeh Utomo NIM: 10800111054**, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Dampak Pendapatan Non Halal Dan Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Muamalat)”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar Proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata - Gowa, Desember 2016

Pembimbing I

Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M. Pd
NIP. 19640706 199103 1 003

Pembimbing II

Saiful, SE, M.SA, Ak
NIP. 19750421 200901 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Muamalat)"**, yang disusun oleh **Huzain Sholeh Utomo, NIM: 10800111054**, mahasiswa jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2017, bertepatan dengan 2 Rajab 1438 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Makassar, 20 Juli 2017

26 syawal 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekretaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag.
Penguji I : Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak.
Penguji II : Memen Suwandi, SE., M.Si.
Pembimbing I : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.
Pembimbing II : Saiful, SE., M. SA., Akt

()
()
()
()
()
()

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar,



KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah atas segala nikmat iman, islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman. Berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (*Study Empiris Pada Bank Muamalat*)**” ini dengan baik.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penulisannya, skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tuaku **Ayahanda (Alm) Muslimin Tammin**, dan **Ibunda H. Siti Jalinar. B,Sc** atas dukungan moril maupun materil dan untaian doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

3. Jamaluddin Majid,SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, serta Memen Suwandi,SE.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku dosen pembimbing I dan Bapak Saiful,SE.,M.SA.,AK sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar..
6. Keluarga besar jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar tanpa terkecuali khususnya Angkatan 2011 terima atas segala dukungannya selama ini..
7. Teman-teman seperjuangan di HMJ Akuntansi periode 2013/2014, BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam periode 2014/2015 dan teman-teman di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi dan Bisnis Islam terima kasih telah menjadi teman belajar dan berproses sama-sama selama kuliah.
8. Sahabat COMMACC 34 yaitu Muh. Sajjaj, Muh. Syihab, Muh. Dahri, Muh. Yusran, Muh. Fadli, Muh. Luthfi, Muh. Syukriadi, Muh. Rezki, Muh. Rifkhi, Muh. Rizal, Muammar, Kurniawan, Fery, Ial, Firdaus, Ilman, Tharmidzi, Fitrah, Fitriani F, Harmawati, Mujahadah, Hasnidar, Harianti, Ferawati, Hasnidar, Harfiah, Indah, Fitriani, dan yang terakhir pendiri commacc Fitrawansah, yang selama ini menemani dari selama menjadi mahasiswa mulai dari hal- hal kecil sampai hal yang besar, Terima kasih atas motivasi,

keakraban dan persaudaraannya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

9. Teman seperjuangan Rosmini, Ichal, Fitrah, Tri, Syadillah, Iwan, Hamka, Rul,Sakti, Zulkupli, Murda, Bapak Ismail Hamzah dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak memberikan pengalaman semasa kuliah dan setiap kegilaannya selama ini
10. Rosmini sebagai partner yang selalu memberikan masukan,semangat dan kritikan atas skripsi yang di buat oleh penulis juga sebagai motivator bagi penulis saat mengalami kesulitan dalam penyelesaian
11. Seluruh penghuni rumah Villa Samata blok A/22 terima kasih bantuan, dukungan, semangat yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Bapak dan Ibu Posko serta seluruh teman-teman KKN Angkatan 50 kecamatan Tanete rilau, desa lasitae Kabupaten Barru

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta petunjuk-Nya kepada kita semua. Akhir kata semoga kebahagiaan dunia akhirat selalu diperuntukkan untuk kita semua. *Aamiin ya Rabbal Alaamiin*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samata, Maret 2017

Huzain Sholeh Utomo
NIM. 1080011054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Kajian Pustaka.....	10
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Syariah Enterprise Theory	14
B. Teori Legitimasi	16
C. Konsep Dasar Pendapatan Non Halal	18
D. Konsep Reputasi perusahaan	24
E. Konsep Kepercayaan Nasabah Terhadap perbankan syariah.....	26
F. Konsep dasar kepatuhan syariah (Shariah Compliance).....	27
G. Rerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan lokasi Penelitian	31
B. Paradigma Penelitian.....	32
C. Sumber Data Penelitian.....	34
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Instrumen penelitian.....	35
H. Teknik pengolahan data dan Analisis data.....	36
I. Pengujian Keabsahan Data.....	39
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
B. Analisis dan pembahasan hasil penelitian.....	57

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Implikasi.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Identitas Narasumber	33
Table 4.1	Informasi Perusahaan	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pikir	30
Gambar 4.1 Struktur pemegang saham	54



ABSTRAK

Nama : Huzain Sholeh Utomo.

NIM : 10800111054

**Judul : Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya
Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah
(Study Empiris Pada Bank Muamalat)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pendapatan non halal yang terdapat pada perbankan syariah khususnya pada PT Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar. Dan untuk mengetahui dampak pendapatan non halal terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah pada PT Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan paradigma interpretif dengan pendekatan studi kasus, untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkup social ataupun lingkup perusahaan. Penelitian ini menggunakan tehnik wawancara dan analisi laporan keuangan untuk mendapatkan bentuk pendapatan non halal pada bank muamalat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan non halal pada bank muamalat berupa pendapatan giro yang berasal dari bank lain, sehingga bentuk kepercayaan nasabah menurun setelah mengetahui adanya pendapatan non halal didalamnya sehingga dapat mempengaruhi tingkat reputasi bank muamalat.

Kata Kunci: Pendapatan non halal, Reputasi, Kepercayaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank pada hakekatnya adalah suatu lembaga keuangan yang lahir karena fungsinya sebagai *agent of trust* dan *agent of development* (Judisseno, 2005). Sebagai *agent of trust*, bank merupakan lembaga perantara (*intermediary*) yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat. Sedangkan sebagai *agent of development*, bank adalah suatu lembaga perantara yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan baik pembayaran maupun penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi operasional sebagai penghimpun dan penyalur dana, serta pemberi jasa-jasa perbankan yang berlandaskan pada syariah Islam yang mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu, Lembaga keuangan syariah (LKS) juga diharapkan agar berdomisili untuk tujuan sosial. Hal ini telah dilakukan oleh LKS misalnya menyalurkan dan mengelola infaq dan shadaqah melalui prinsip *qardhul hasan*. Yakni pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dan mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah ditentukan (Alim, 2011: 177).

Bank syariah, atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum)

Islam. Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah (Wibisono, 2012).

Menjamurnya perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari minat masyarakat yang membutuhkan sistem perbankan yang dapat menyediakan produk dan layanan keuangan yang sehat dan juga memenuhi prinsip-prinsip islamiah. Menurut UU No. 10 tahun 1998, Bank merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Salehodin (2014) Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi operasional sebagai penghimpun dan penyalur dana, serta pemberi jasa-jasa perbankan yang berlandaskan pada syariah Islam yang mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Sedangkan pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Antonio, 1999). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bank islam atau bank syariah merupakan badan usaha yang

fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat serta penyalur dana dari masyarakat yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada hukum islam atau prinsip syariah sebagaimana yang dianut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist (Usman, 2012:35).

Seperti yang di kemukakan Syafei (2013) yang menyatakan bahwa pendirian bank Syariah sejatinya adalah dalam rangka mencapai *falaah* (kesuksesan di dunia dan di akhirat), Syafei (2013) juga menyatakan bahwa bank Syariah ditujukan untuk menciptakan suatu perekonomian masyarakat yang seimbang (adil). bank Syariah sebagai suatu lembaga bisnis Islami tetap dibenarkan untuk menghasilkan laba tetapi bukan untuk menghasilkan laba yang maksimum. Lebih jauh, tindakan untuk menghasilkan laba maksimum menyebabkan bank Syariah mengabaikan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dalam melakukan ekspansi bisnisnya, selain membuka kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, PT BMI juga membuka kantor cabang internasional di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2009 dan tercatat sebagai bank pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia. PT BMI memiliki serangkaian produk dan layanan, antara lain; produk Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia

Salah satu pendapatan dari Bank muamalat indonesia di dapatkan dari transaksi atau akad salah satunya mudharabah yang dilakukan antara pihak bank dan pihak nasabah atau mudharib, mudarabah yang dimaksud ialah pembiayaan mudharabah yang diamana menurut Qordhawi (1997, 184) yang

menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah yang secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini nasabah / mudharib tetapi merupakan tindakan yang memperlak dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan berisiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kesedihan orang miskin.

Dengan demikian menurut fatwa Dewan syariah nasional (2000,40) perbankan syariah yang memberikan pembiayaan mudharabah terhadap nasabah/mudharib dengan sendirinya akan menjadikan hubungan di antara kedua belah pihak bagaikan mitra dalam meraih keuntungan riil pada pengelolaan kegiatan usaha mereka. Pada konsep pembiayaan bagi hasil mudharabah dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah Qiradh adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pemilik dana (shahibul maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Perbankan syariah didirikan berdasarkan pada alasan filosofis dan praktiknya. Alasan filosofis dari didirikannya perbankan syariah adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan (Machmud dan Rukmana, 2010:5). Inilah yang menjadi indikator bank syariah kini menjadi salah

satu bank terpopuler di masyarakat karena bank syariah dianggap lebih memberikan kenyamanan dan berkah dibandingkan dengan bank konvensional. Usnah (2015:147) bahkan menjelaskan bahwa kelahiran bank syariah tidak terlepas dari upaya penggalangan dana masyarakat yang selaras dengan orientasi nilai yang tumbuh dalam masyarakat Islam. Maka, sudah sangat jelas bahwa Islam melarang praktik muamalah yang mengandung dan dapat menimbulkan riba, sehingga didirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam dalam hal ini bank syariah.

Lembaga keuangan syariah dianggap sebagai entitas yang unik dan memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Namun dibalik perkembangannya yang cukup pesat tersebut, ternyata masih terjadi perdebatan di kalangan masyarakat terkait masalah kesyariahan dari bank syariah. Seperti yang diungkapkan oleh (Mu'allim 2003) bahwa beberapa ilmuwan Muslim ada yang mengecam bank syariah, mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan atau menerapkan transaksi-transaksinya justru bertentangan dengan konsepnya, atau dengan kata lain bank syariah telah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariahnya. Padahal sudah ditetapkan bahwa bank syariah dalam melakukan usaha wajib mengimplementasikan prinsip syariah, sebagaimana yang secara tegas tercantum dalam pasal 2 UU No.21 tahun 2008 bahwa "Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian." (Usman, 2012:115). Hal ini terjadi disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara konsep dan praktik yang terjadi di bank syariah.

Mu'allim (2003) menyatakan bahwa bank-bank syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya ternyata bukan meniadakan bunga dan membagi resiko, namun tetap mempertahankan praktik pembebanan bunga serta menghindari resiko dengan cara yang licik. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah sebagian besar memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah karena merasa ragu akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Menurut Capra, kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85% (Umar Chapra dan Habib Umar, 2002). Secara implisit, hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Wardayati, 2011).

Penerimaan bunga oleh lembaga keuangan syariah dari mitra bisnis yang merupakan lembaga keuangan konvensional sudah ada ketentuannya, yaitu sebagaimana yang telah disampaikan oleh (Antonio, 2001: 133) yaitu dengan adanya pertimbangan pemanfaatan bunga ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil) bila dibandingkan dengan dana tersebut apabila ada dan dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga non-muslim. Dengan kata lain bahwa apabila bunga tersebut masih ada di lembaga keuangan konvensional tentunya akan dimanfaatkan oleh mereka dalam bisnis utamanya yang hanya berprosentase pada bunga dan pada akhirnya bunga akan melahirkan bunga.

Berdasarkan Annually Report PT. Bank Muamalat Indonesia (2015) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah

Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) saat ini menjadi isu yang penting bagi *stakeholders* bank syariah di Indonesia. Banyak kritik dari masyarakat tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, karena bank syariah di Indonesia saat ini dinilai kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Suprayogi, 2013). Berdasarkan *survey* dan penelitian

mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah di bank syariah. Komplain yang sering muncul adalah aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) (Wardayati, 2011).

Pengawasan bank syariah yang berada dalam otoritas Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dilakukan dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional kegiatannya dan pelaporannya sesuai konsep perbankan syariah serta sesuai prinsip akuntansi berterima umum (Minarni, 2013). Dalam artikel yang sama, Minarni (2013) menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang utama dalam pengendalian dalam aspek syariah dan auditor memiliki peran utama dalam menguji (*examination*) penyajian laporan keuangan yang *fair*.

Kepatuhan syariah merupakan pilar utama yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini lembaga Bank Syariah (Ilhami, 2009). Sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Oleh karena itu, adanya jaminan atas pemenuhan prinsip-prinsip syariah atau dengan istilah kepatuhan syariah (*syariah governance*) agar diterapkan untuk seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah di lembaga keuangan

syariah dalam upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah serta melindungi kepentingan nasabah dalam rangka menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

Sebagai perusahaan perbankan yang berbasis syariah PT Bank Muamalat Indonesia seharusnya telah menerapkan pencatatan pendapatan dana non halal yang terdapat pada laporan keuangan yang di keluarkan. agar para pengguna dari laporan keuangan tersebut memiliki informasi yang cukup dalam mengambil keputusan sebab menurut Solehuddin (2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan non-halal dicatat dan dibuat akun secara terpisah bukan hanya sebagai sumber dananya saja, tapi lembaga keuangan syariah juga mencatat dan melaporkan secara terpisah pula terhadap penggunaan pendapatan non-halal tersebut pada sebuah laporan sumber dan penggunaan dana. Akan tetapi PT Bank Muamalat Indonesia belum menyertakan laporan keuangan tentang pendapatan non halal yang seharusnya dapat memberi informasi lebih terhadap pengguna laporan keuangannya tersebut.

Selain itu Solehuddin (2014) juga menyatakan bahwa Kehati-hatian dan ketelitian dalam pengelolaan pendapatan non-halal haruslah selalu terjaga oleh lembaga keuangan syariah. Bukan hanya karena menjaga dan menghindari salah catat atau kekeliruan yang materialitas dalam sebuah laporan keuangan, namun sebagai “barang taruhan” terhadap sebuah pengelolaan yang bijak dan bajik mengingat bahwa bunga adalah sumber bencana ekonomi syariah kedepannya. Jalan keluarnya adalah pendapatan non-halal digunakan untuk sumbangan atau hibah kepada Negara Indonesia. Yaitu untuk dibayarkan kepada bunga akibat dari

pinjaman yang telah dilakukan oleh Negara Indonesia dalam upaya penutup anggaran untuk kebutuhan bangsa Indonesia tercinta ini dengan kata lain bahwa bunga harus diserahkan kepada bunga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, telah dipaparkan bahwa pendapatan yang tidak sesuai dengan syariat islam selanjutnya disebut sebagai pendapatan dana Non Halal.dengan adanya pengungkapan pendapatan dana non halal menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat reputasi dan kepercayaan pada Perbankan Syariah. maka penulis tertarik untuk menganalisa dampak pendapatan non halal dan penggunaannyaterhadap kepercayaan dan reputasi bank syariah,oleh karena itu penulis mengangkat beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana bentuk pendapatan dana non halal pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar ?
2. Bagaimana dampak penggunaan pendapatan non halal terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah pada Bank Muamalat ?

C. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang dijadikan pijakan dan bahan rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian Hisamuddin dan Sholika (2014), Roziq dan yanti (2012) juga Salehuddin dkk (2014) yang meneliti tentang pengungkapan bentuk pendapatan nonhalal yang terdapat pada entitas syariah.

Hisamuddin dan sholika (2014) meneliti tentang persepsi penyajian dan pengungkapan dana non halal pada BAZNAS dan PKPU di kabupaten Lumajang. Dalam penelitian yang dilakukan mereka menemukan bahwa pada BAZNAS dan

PKPU yang notabene merupakan lembaga pengumpul, pengelola, dan penyalur zakat, infak juga sedekah yang diterima dari muzaki kemudian disalurkan kepada mustahiq belum mengungkapkan serta menyajikan pelaporan tentang pendapatan non halal yang terdapat pada dana yang diterima dari para muzaki yang terindikasi merupakan pendapatan non halal karena dana tersebut dihimpun melalui gaji PNS yang dipotong untuk zakat melalui bank konvensional dan dana yang ditransfer melalui bank konvensional. penelitian ini juga menyatakan beberapa alasan yang melatarbelakangi pembuatan catatan atas laporan keuangan tentang pendapatan non halal pada BAZNAS dan PKPU kabupaten Lumajang.

Roziq dan Yanti (2012) meneliti tentang pengakuan pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan lembaga amil zakat. Penelitian yang dilakukan pada beberapa lembaga amil zakat menemukan bahwa penerapan PSAK 109 yang didalamnya terdapat aturan main dalam dana nonhalal telah di realisasikan dengan baik oleh beberapa lembaga amil zakat akan tetapi penyaluran dana amil zakat masih terselip dana non halal yang seharusnya di pisahkan dalam penyaluran dana kepada para mustahiq.

Salehuddin dkk (2014) meneliti tentang Ahsan-kah pendapatan nonhalal pada Qadhrul Hasan. Penelitian ini menjelaskan bahwa *Qardhul hasan* pada lembaga keuangan syariah merupakan pinjaman dengan tanpa adanya pengembalian lebih. Dimana dana tersebut diperoleh atau bersumber dari infak, shadaqah, denda dan pendapatan non-halal yang diterima oleh lembaga keuangan syariah. Namun, sumber dana *qardhul hasan* menimbulkan keraguan walaupun adanya pencatatan secara terpisah antara pendapatan non-halal dengan

sumber dana yang lain yang merupakan pendapatan halal. Hal itu disebabkan karena penggunaan pada dana *qardhul hasan* dalam keadaan *subhat* yaitu masih belum ada kejelasan antara penggunaan pendapatan non-halal dengan pendapatan halal. Sehingga lembaga keuangan syariah perlu melakukan pencatatan secara terpisah atau memisahkan pendapatan non-halal baik sebagai sumber ataupun dalam penggunaannya. Penggunaan pendapatan non-halal pada dana *qardhul hasan* membutuhkan kehati-hatian yang lebih, mengingat bunga adalah hasil riba dan merupakan sumber bencana ekonomi dan dilaknat oleh Allah SWT. Oleh sebab itu pendapatan non-halal digunakan untuk kegiatan ekonomi yang membutuhkan pendapatan non-halal, yaitu digunakan sebagai hibah kepada Negara dalam membayar beban bunga yang diperoleh dari pinjaman selama ini yang menjadi warisan Negara dari tahun ke tahun dan dilaporkan tersendiri oleh lembaga keuangan syariah.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah:

1. Mengetahui tentang bentuk pendapatan non halal yang terdapat pada perbankan syariah khususnya pada PT Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar.
2. Mengetahui dampak pendapatan non halal terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah pada PT Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dalam pengembangan Akuntansi Syariah yang berkorelasi pada pendapatan non halal yang terdapat nilai islam dalam pengaplikasian pada perbankan syariah yang berpegang pada aturan agama dan kepatuhan syariah guna mendalami konsep akuntansi syariah yang murni berasal dari nilai ilahiah.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan rerangka konsep pemahaman mengenai penerapan akuntansi Syariah berbasis kepatuhan syariah (*Syariah compliance*) yang menyangkut pendapatan non halal yang ada pada perbankan Syariah dan implikasinya terhadap kepercayaan nasabah dan tingkat reputasi perbankan syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Syariah Enterprise Theory

Triyuwono (2012: 355) mengungkapkan akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. *Enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggung jawaban, bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah SWT. *Syariah Enterprise Theory* Triyuwono (2012: 356) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. *Syariah enterprise theory* memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah), tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak terkait secara langsung terhadap operasi perusahaan. Oleh karena itu, *syariah enterprise theory* akan membawa kemashalatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat dan

lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Triuwono, 2012: 357).

Telaah manfaat dari Teori Syariah *Enterprise* ini dimana perbankan syariah harus berlandaskan *syariah enterprise theory* dalam melaksanakan tugasnya, karena perbankan syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik melainkan kepada *stakeholder* dan Allah SWT. Penerapan prinsip *syariah enterprise theory* pada perbankan syariah akan membuat kinerja bank lebih sehat, dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah dan penerapan *Islamic corporate governance* dalam menerapkan prinsip tersebut akan memungkinkan bank untuk mendapatkan kategori sebagai bank sehat. Perbankan syariah juga akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan yang mungkin dilakukan. Penerapan prinsip *syariah enterprise theory* bank umum syariah harus memberikan informasi yang akurat dan transparan, sehingga pemilik modal yakin akan kebenaran informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh pihak bank umum syariah.

Shariah enterprise theory (SET) mengajukan beberapa karakteristik terkait tema dan item yang diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan syariah. Karakteristik-karakteristik ini, menurut Meutia (2010), adalah:

1. Menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan dan akuntabilitas horizontal terhadap direct stakeholders, indirect stakeholders, dan alam.

2. Menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh stakeholders, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi konsep keseimbangan.
3. Mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh.

Meutia (2010) mengatakan terdapat beberapa dimensi yang ditawarkan oleh syariah enterprise theory dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama oleh perbankan syariah. Dimensi-dimensi tersebut, menurut Meutia (2010), adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ini, dinyatakan oleh Meutia (2010), ditujukan hanya kepada Tuhan. Sedangkan akuntabilitas horizontal, menurut Meutia (2010), ditujukan kepada tiga pihak, yaitu direct stakeholders, indirect stakeholders, dan alam. Pihak-pihak yang disebut direct stakeholders menurut syariah enterprise theory adalah nasabah dan karyawan. Sedangkan pihak yang termasuk indirect stakeholders menurut syariah enterprise theory adalah komunitas

B. Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) sebagai suatu kondisi yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan yang sejalan dengan sistem nilai yang berlaku. Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Menurut Hadi (2011) menyatakan bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat (Ardian, 2015). Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau

asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan.

Implikasi teori legitimasi dalam hal ini adalah eksistensi Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dimana Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1.12 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah yakni prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Asasnya adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian (pasal 2) sedangkan pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan perbankan syariah ini dapat terwujud jika para manajemen menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dan dapat menjalankan fungsinya secara baik, termasuk fungsi dari Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Direksi/Direktur bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS/UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah dan berkewajiban mengelola BUS / UUS sesuai dengan kewenangan dan

tanggung jawabnya sedangkan Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasehat.

C. Konsep Dasar Pendapatan Non Halal

Menurut Sahroni (2014) mengemukakan bahwa Secara kriteria pendapatan non halal dapat menjadi 2 yaitu

1. Harta yang haram karena dzatnya yang najis (*haram lidzatihi*), seperti minuman memabukan, daging babi, dll.
2. Setiap asset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru'*), usaha yang tidak halal seperti: pinjaman berbunga,

Kedua jenis harta tersebut status hukumnya haram / diharamkan, yang pertama karena dzatnya, dan yang kedua karena bersumber dari usaha yang tidak halal. Dalam praktiknya, dana yang dimobilisasi oleh lembaga keuangan syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, baik dalam bentuk tabungan ataupun deposito, itu tidak mungkin berupa harta haram karena dzatnya. Yang mungkin terjadi adalah dana tabungan atau deposito bersumber dari usaha yang tidak halal, misalnya, pemilik deposito adalah bank konvensional yang menjadi pemodal di LKS dan diketahui bahwa yang investasikan adalah pendapatannya berupa bunga atas pinjaman.

Hal yang banyak terjadi adalah penanaman modal di pasar modal, yaitu jual beli atau sukuk. Misalnya investor membeli saham / sukuk, kegiatan utamanya adalah pinjaman berbunga sebagai bank konvensional, atau jual beli minuman keras, tetapi investor tersebut menyembunyikan, karena seluruh

transaksi di bursa melalui pialang dan diketahui underlying assetnya secara jelas. Oleh karena itu dalam Standar Syariah Internasional (*al-Ma'ayir asy-syar'iyah*) AAOIFI, fatwa DSN, Fatwa Lembaga Fikih OKI, menjelaskan sumber harta dalam konteks pasar modal (jual beli saham dan sukuk) tidak di perbolehkan

Hal yang mendasari larangan penggunaan pendapatan non halal tercantum pada surah An-Nisa ayat 29 :

تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Maksud ayat diatas adalah sebuah perdagangan yang didasarkan saling ridha antara penjual dan pembeli tanpa ada satu paksaan sedikitpun. Akan tetapi ayat ini masih umum, artinya tidaklah boleh kita melakukan transaksi secara ridha kalau misalnya transaksi tersebut mekanismenya sudah dilarang secara qhot'I didalam al aquran seperti hal nya larangan riba, maysir dan gharar. Meskipun transaksi antara pelaku riba, maysir dan gharar saling ridha satu sama lain, maka hal ini tidak bias disahkan secara hokum syariah karna sudah di khususkan (thakhsish al'umum) dengan ayat larangan didalam al quran dan al sunnah mengenai tiga hal tersebut.

Sahroni (2014) memaparkan bahwa hukum harta non halal bisa disimpulkan, bahwa setiap pendapatan dari usaha- usaha sebagaimana tersebut di atas itu diharamkan. Pendapatan yang dimaksud adalah :

- a. Bunga atas transaksi pinjaman
- b. Pendapatan dari usaha yang aktifitas pinjaman berbunga lebih dominan
- c. Pendapatan dari usaha perjudian, minuman keras, barang merusak moral dan mudharat

Pendapatan tersebut tidak boleh dijadikan modal usaha / bisnis, sesuai dengan kaidah fikih:

“Setiap harta yang tidak bisa dimiliki, maka harta tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain”.

Hal ini sesuai juga dengan penjelasan Standar Syariah AAOIFI dalam Sahroni (2014), yaitu sebagai berikut:

“Pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupun dengan cara hilah ribawiyah seperti digunakan untuk membayar pajak”

Pembahasan tentang pendapatan non halal juga di kemukakan oleh Dewan Syariah NAS MUI (2006: 274) menyatakan bahwa Pendapatan non halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru'*). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan beberapa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tersebut yaitu:

- a. Usaha Lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional

- b. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari pada modalnya.
- c. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang
- d. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram
- e. Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang atau jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat.

Fatwa DSN menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha yang umumnya terjadi di Bursa Efek. Oleh karena itu usaha non halal tidak terbatas pada lima usaha tersebut, tetapi banyak lagi transaksi yang dilarang, seperti riba, sharf, spekulasi, penipuan, dan suap.

1. Ketentuan dana yang sepenuhnya haram

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan, bahwa dana yang tidak halal adalah pendapatan dari usaha yang tidak halal, seperti :

- a. Bunga atas transaksi pinjaman
- b. Dividen dari transaksi emiten (dengan prosentase utang non halal lebih dominan dari modalnya).
- c. Pendapatan dari usaha perjudian, jual beli minuman memabukkan, barang yang merusak moral dan atau menimbulkan mudharat.

Dana-dana tersebut itu diharamkan menurut Islam, sebagaimana nash-nash yang melarangkan transaksi *ribawi*, *maisir*, *khamr*, dan lain sebagainya.

1. Hukum pendapatan halal yang bercampur dengan pendapatan non halal

Secara umum, ada dua pendapat ulama tentang hukum masalah ini, yaitu sebagai berikut:

Pendapat pertama: Sebagian ulama berpendapat, bahwa dana halal yang bercampur dengan dana non halal itu hukumnya haram. Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) termasuk di antara yang berpendapat bahwa dana tersebut dikategorikan dana haram, sebagaimana dilansir dalam keputusannya sebagai berikut:

Keputusan lembaga Fikih Islam no. 7/1/65, pada pertemuan ke 7: bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa membeli saham pada perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan usaha yang haram, seperti, transaksi ribawi, memproduksi barang yang haram, jual beli barang yang haram. Pada prinsipnya, haram membeli saham pada perusahaan yang kadang-kadang melakukan transaksi yang haram, seperti transaksi ribawi, dan sejenisnya, walaupun kegiatan utama perusahaan tersebut itu adalah usaha yang halal.

Di antara dalil (*istisyhad*) yang digunakan adalah kaidah fikih berikut:

Jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram. Sesuai kaidah fikih ini, jika dana halal bercampur dengan dana haram, maka hukum haram lebih diunggulkan dan menjadi hukum keseluruhan dana tersebut.

Pendapat kedua: Sebagian ulama berpendapat, bahwa jika dana yang halal lebih dominan dari pada dana non halal, maka keseluruhan dana tersebut menjadi halal. Mereka berargumen dengan dalil-dalil berikut:

1. Kaidah fikih: *Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan*.
2. Maslahat (*al-Hajah asy-syar'iyah*): Kebutuhan perusahaan syariah untuk melakukan usaha dan bisnisnya tersebut supaya bisa bertahan menunaikan misinya menghindari praktik bisnis ribawi dan memberikan alternatif berupa praktik yang halal.

Berdasarkan Sahroni (2014) menyatakan bahwa Banyak para ulama yang menegaskan tentang hal ini, beberapa ulama diantaranya Ibnu Nujaim menjelaskan sebagai berikut :

Jika terjadi di sebuah negara, dana halal bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil, kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram.

An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas , maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram. Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah Swt., setiap kali dana haram itu banyak, maka harus disikapi dengan wara'

Ibnu Taimiyah menjelaskan sebagai berikut:

Adapun orang yang bertransaksi secara ribawi, maka yang dominan adalah halal kecuali diketahui bahwa yang dominan adalah makruh. Karena jika seseorang menjual 1000 seharga 1.200, maka yang haram adalah marginnya saja. jika pendapatannya terdiri dari dana halal dan haram yang bercampur , maka bagian yang haram ini tidak mengharamkan bagian yang halal. ia bisa mengambil bagian yang halal tersebut, sebagaimana jika dana milik dua orang syarik, dana syirkah telah bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana tersebut dibagi kepada dua syarik tersebut.

Jika ditelaah, pendapat yang kuat (*rajih*) adalah pendapat kedua yang menegaskan bahwa:

- a. Jika dana halal itu lebih dominan, maka seluruh dana tersebut menjadi halal
- b. Jika dana halal sama atau lebih sedikit, maka prosentase dana haram harus dikeluarkan. Sedangkan dana yang tersisa hukumnya halal.

Pendapat yang kedua itu lebih tepat untuk diterapkan, karena beberapa hal:

- a. *Umum al-balwa*, maksudnya dana halal yang bercampur tersebut menjadi sulit dihindarkan dalam aktivitas bisnis dan atau selain bisnis.

- b. *Raf'ul haraj wal hajah al-ammah* (meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum), di antaranya, lingkungan dan pranata ekonomi masih belum islami ; regulasi tidak memihak LKS, masyarakat yang belum paham ekonomi syariah, industri konvensional yang mendominasi, sehingga transaksi dengan konvensional menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.
- c. *Muro'atqowa'id al-katsrahwa al-ghalabah*, maksudnya standar hukum adalah bagian lebih dominan.
- d. Kaidah sebagian fuqaha tentang *tafriqshafqah* (memisah transaksi halal dari transaksi yang haram).

D. Konsep Reputasi Perusahaan

Jatmiko (2011) disebutkan bahwa terdapat beberapa aspek dalam membentuk reputasi perusahaan, antara lain kemampuan finansial, mutu produk dan pelayanan, fokus pada pelanggan, keunggulan dan kepekaan sdm, reliability, inovasi, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab sosial, dan penegakan *good corporate governance* (gcg).

Selain dari Jatmiko (2011), Rosidah, (2011) juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mengukur reputasi sebuah perusahaan. Adapun keenam faktor utama yang digunakan dalam instrumen Spector, sebagai berikut. Dinamis, adapun sebuah perusahaan dikatakan dinamis adalah sebagai berikut: pelopor, menarik perhatian, aktif dan berorientasi pada tujuan. Kooperatif, adapun ciri-ciri perusahaan yang dapat bekerjasama dengan baik adalah sebagai berikut: ramah, disukai, membuat senang orang lain dan memiliki hubungan baik dengan orang lain.

Bijaksana, ciri-ciri perusahaan yang berorientasi pada bisnis adalah sebagai berikut.: bijak, cerdas, persuasif, terorganisir dengan baik. Berkarakter, sebuah organisasi atau perusahaan yang baik, harus memiliki karakter yang baik pula seperti : etis, reputasi baik dan terhormat. Sukses, ciri yang dimiliki organisasi atau perusahaan sukses adalah kinerja keuangan yang baik dan percaya diri. Mampu Menahan Diri, ciri-ciri organisasi atau perusahaan yang mampu menahan diri : ketat, menjaga rahasia dan berhati-hati

Trimanah (2012) menyebutkan bahwa Charles J. Fombrun dalam *Reputation* menggambarkan hubungan antara identitas perusahaan, nama, image dan reputasi. Identitas perusahaan digambarkan sebagai: *“the set of value and principles employees and managers associate with company.* Identitas perusahaan, disosialisasikan atau tidak, itu merupakan sebuah gambaran pemahaman bagaimana karyawan akan bekerja, bagaimana produk akan dibuat, bagaimana stakeholders akan dilayani, dan lain-lain. Identitas perusahaan diturunkan dari pengalaman perusahaan, merupakan akumulasi prestasi dan cacat yang telah dibuat selama ini reputasi perusahaan merepresentasikan “jaringan” reaksi afektif atau emosional baik itu reaksi baik atau buruk, kuat atau lemah dari konsumen, investor, karyawan dan publik terhadap nama perusahaan. Dalam hal ini konsep reputasi (Reputation Concept) bisa didapatkan melalui pengidentifikasian pendapatan non halal dari bank syariah yang dapat membantu untuk mendokrak reputasi perbankan syariah tersebut. Accountability (akuntabilitas) dari pengungkapan dana non halal dari perbankan syariah bisa menjadi pengacu meningkatnya reputasi perbankan syariah

E. Konsep Kepercayaan Nasabah Terhadap Perbankan Syariah

Lau dan Lee (1999), mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan (*willingness*) seseorang untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan resiko tertentu. Kepercayaan juga diartikan sebagai kesediaan seseorang untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena ia mempunyai keyakinan (*confidence*) kepada pihak lain tersebut. Salah satu aspek yang tidak kalah penting untuk menjaga agar nasabah tetap loyal adalah kepercayaan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa kepercayaan merupakan salah satu unsur penting dalam loyalitas nasabah, kepercayaan sebagai dasar penting untuk membangun dan memelihara hubungan jangka panjang. Kepercayaan merupakan modal penting dalam meningkatkan loyalitas nasabah terutama dalam membangun hubungan jangka panjang, sehingga kepercayaan memegang peranan penting dalam keberlangsungan perusahaan untuk waktu yang akan datang (Wahyuni, 2011)

Morgan dan Hunt dalam Wahyuni (2011) mengemukakan bahwa kepercayaan merupakan elemen penting yang mempengaruhi tingkat loyalitas pelanggan. Kepercayaan terhadap penyedia jasa akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap penyedia jasa, semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap penyedia jasa maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas yang mereka miliki dan sebaliknya apabila konsumen tidak memiliki kepercayaan terhadap penyedia jasa tentunya konsumen melakukan perpindahan terhadap penyedia jasa lain.

Kepercayaan nasabah perbankan *syariah* ini mencakup juga adanya

keyakinan akan bagi hasil dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil mensyaratkan kerjasama pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus untuk masyarakat. Selain itu adanya ketaatan terhadap perintah agama dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip *syariah* Islam dengan baik, menunjukkan bahwa nasabah berorientasi kepada kebahagiaan yang bersifat *ukhrawi* (akhirat). Kepercayaan nasabah terhadap bank merupakan faktor penting yang mempengaruhi loyalitas nasabah karena pada dunia perbankan kepercayaan adalah faktor yang sangat penting. Dengan adanya kepercayaan nasabah yang tinggi terhadap bank maka bank dapat menghimpun dana sebanyak mungkin dari nasabah dan nasabah akan selalu memiliki sifat yang loyal terhadap bank tersebut (Kasmir, 2008).

F. Konsep Dasar Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance)

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB,

AAOIFI, *Syariah Supervisory Board (SSB)*.(Sukardi)

Ardhaningsih (2012) menyatakan bahwa Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board (IFSB)* dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Dewan pengawas syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian *stakeholders*, karena mereka

adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan dewan pengawas syariah memiliki lima isu tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Islam, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank, dari atasan sampai bawahan (*top-down*).

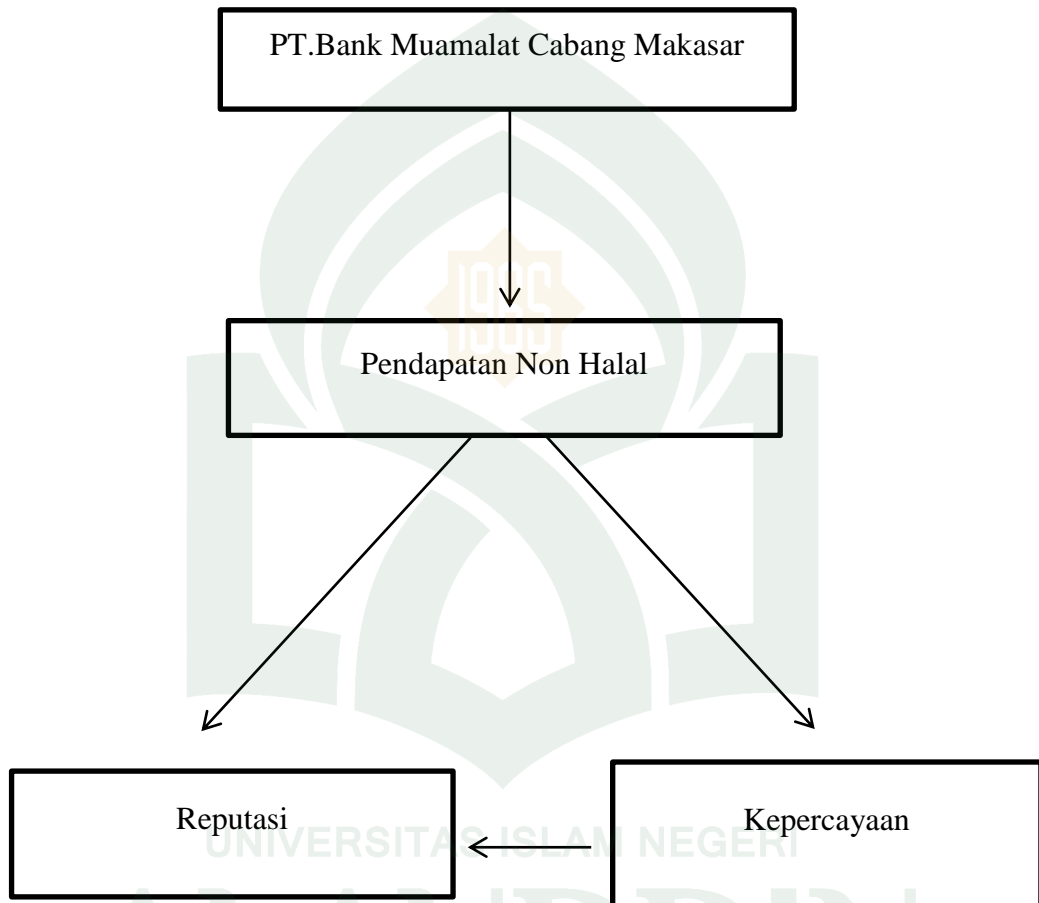
Berbagai pengaturan dalam undang-undang maupun PBI sudah ditetapkan sebagai regulasi pengembangan perbankan syariah di Indonesia seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan *integrative* mengatur perbankan syariah di Indonesia. Secara khusus, kerangka hukum kepatuhan syariah juga sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 September 2011.

G. Rerangka Pikir

Penjelasan landasan teori diatas, pembahasan pada pendapatan non halal yang di dapat di definisikan sebagai pendapatan yang di hasilkan melalui praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum islam, adapun

pendapatan non halal pada bank muamalat dapat mempengaruhi tingkat reputasi dan kepercayaan nasabahnya. Adapun gambar rerangka konseptual yang di bahas adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Rerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Indrianto dan Supomo (2013: 12) merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data pada kantor Bank Muamalat Selain itu, pengambilan data juga dilakukan dengan mengakses situs resmi perusahaan yang akan diteliti, dan dengan mengunduh (*download*) melalui internet data-data lain yang terkait penelitian.

Berdasarkan tujuan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif interpretif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai objek atau informan yang akan diteliti.

Selanjutnya Sugiyono (2009) menyatakan bahwa "*an investigation might be simple or complex, dealing with a single event or multiple event, might be small or large.*" Jadi temuan dalam penelitian kualitatif bisa sederhana maupun kompleks, terjadi pada peristiwa tunggal maupun majemuk, kecil atau besar. Bila dilihat dari *level of explanation*, penelitian ini bisa menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu

memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial satu dengan situasi sosial lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola- pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, serta dapat menemukan hipotesis dan teori. Hasil penelitian kualitatif yang tertinggi kalau sudah dapatn menemukan teori, atau hukum-hukum, dan paling rendah adalah kalau masih bersifat deskriptif.

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik atau metode *ethnogra- phy*. Dalam Creswell (2007) mengajukan lima pendekatan dalam melakukan penelitian kualitatif. Kelima pendekatan tersebut adalah: *narrative re- search*, *phenomenoloical research*, *grounded theory research*, *ethnographic research*, dan *case study re- search*. Kelima pendekatan tersebut memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beragam pendekatan, dan berbagai kesempatan dan tantangan yang ada. Efferin *et al* (2004), menyatakan ada dua pendekatan dalam melakukan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan interpretif dan pendekatan kritikal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualiatitatif berdasarkan paradigma interpretif dengan pendekatan studi kasus dimana Menurut Suharsini (2010:238), Penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian yang mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif interpretif, Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan, dan fenomena yang terjadi seperti yang di kemukakan oleh

Saeful (2009) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Menurut Paranoan (2015) menyatakan bahwa Paradigma interpretive ini lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol (dalam hal ini adalah akuntansi). Tugas dari teori ini adalah memaknai (*to interpret* atau *to understand*) jadi bukan *to explain* dan *to predict* sebagaimana pada paradigma positivisme. Kualitas teori dalam paradigma ini adalah diukur dari kemampuannya memaknai bukan pada kemampuannya untuk menjelaskan dan meramalkan. Paradigma ini memiliki kesadaran konstektual yang tinggi, di mana paradigma ini tidak untuk menggeneralisasikan temuan penelitian atau teori. Teori ini tidak memiliki perhatian pada hukum yang universal.

Paradigma interpretif memahami bentuk fundamental dari dunia sosial pada level pengalaman subjektif seseorang. Dengan kata lain paradigma ini mencari penjelasan dalam realisme tentang subjektivitas dan kesadaran individu, dalam kerangka acuan mengenai partisipan berhadapan dengan peneliti mengenai tindakan. Pendekatan ini, bagi ilmu sosial, cenderung nominalis, anti positivistik, voluntaris, dan ideografik. Paradigma ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang bersifat subjektif, diciptakan (ditemukan), dan

ditafsirkan. Paradigma tersebut memahami hakikat manusia sebagai pencipta dunianya, menciptakan sistem makna. Ilmu Pengetahuan yang dibangunnya bersifat *common sense*, induktif, *ideographic*, menekankan pada makna, tidak bebas nilai.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer ini berasal dari jawaban responden atas wawancara yang dilakukan kepada responden. Dan juga menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan Bank Muamalat.

Adapun identitas dari narasumber yang akan di wawancarai untuk penelitian ini berasal dari karyawan dan nasabah dari Bank Muamalat Indonesia.

NO	NAMA	PEKERJAAN	JABATAN
1	IKHWAN DUNGA	Karyawan Bank Muamalat	Operation Control pada Bank Muamalat
2	SITI JALINAR ABDULLAH	Ibu Rumah Tangga	Nasabah Bank Muamalat
3	HAIKAL SUMARJAN	Karyawan	Nasabah Bank Muamalat
4	NURUL CAHYA	Ibu Rumah Tangga	Naabah Bank Muamalat

Table 3.1. Daftar identitas narasumber

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Metode wawancara (*interview Methods*), data yang akan diperoleh dengan cara mewawancarai (*Interview*) responden secara langsung. Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penelitian menggunakan metode pengumpulan data Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di kancah lapangan kerja penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data di lapangan berupa wawancara kepada para pimpinan karyawan.
2. Studi dokumentasi, yaitu prosedur pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen sosial perusahaan yaitu yang mengandung *narrative text*, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan mengenai data pendapatan bank.
3. Studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.
4. *Internet Searching* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari *internet* guna melengkapi referensi penulis berkaitan masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini hal yang dilakukan dan dianggap penting untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memudahkan dalam penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara dan alat rekam suara dan pengambilan gambar sebagai alat untuk memperoleh ke absahan data. Dan juga berupa laporan keuangan dari objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan intrumen utama penelitian, di mana peneliti sekaligus sebagai perencana yang menetapkan fokus, memilih informan, sebagai pelaksana pengumpulan data, menafsirkan data, menarik kesimpulan sementara di lapangan dan menganalisis data di lapangan yang alami tanpa dibuat-buat. Sudarwin (2002:31) menyatakan bahwa peneliti sebagai instrument dalam penelitian kualitatif mengandung arti bahwa peneliti melakukan kerja lapangan secara langsung dan bersama beraktivitas dengan orang-orang yang diteliti untuk mengumpulkan data. Konsekuensi peneliti sebagai instrumen penelitian adalah peneliti harus memahami masalah yang akan diteliti, menurut Djaelani (2013) Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat dinamis, di mana peneliti memasuki lapangan yang terbuka apa adanya, otomatis peneliti menghadapi situasi yang sulit diprediksi dengan tepat apa yang sudah, sedang dan akan terjadi. Untuk itu maka peneliti haruslah mengandalkan teknik-teknik pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara, observasi, dokumen dan pemaknaan. Peneliti dituntut untuk menunjukkan bukti secara nyata dari lapangan. teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam ditambah Dokumentasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan paradigma deskriptif yang didalamnya terdapat pandangan kritis dalam melihat irrelevansi antara perbankan syariah dan pendapatan non halal yang dimiliki oleh perbankan syariah dengan menggunakan syariah enterprise theory sebagai kritikan terhadap praktek pendapatan bank yang bersifat non halal. adapun tahapan pengelolaan data yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi

data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, kekeluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, dalam penelitian ini di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dirasa mempermudah peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi. dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja), dan *chart*.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif validitas dan realibilitas dinamakan sebagai kredibilitas. Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama yaitu: (a) Peneliti tidak 100 % independen dan netral dari *research setting*; (b) Penelitian kualitatif sangat tidak terstruktur (*messy*) dan sangat *interpretive*. Dalam meningkatkan kredibilitas menurut Anis (2009) terdapat 9 prosedur yaitu: (i) *Triangulation*; (ii) *Disconfirming evidence*; (iii) *Research reflexivity*; (iv) *Member checking*; (v) *prolonged engagement in the field*; (vi) *collaboration*; (vii) *the audit trail*; (viii) *thick and rich description*; dan (ix) *peer debriefing*.

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Terdapat dua macam validitas penelitian yaitu, validitas internal dan validitas eksternal. Untuk menilai keabsahan data penelitian yang bersifat kualitatif, dilakukan beberapa uji keabsahan, antara lain :

1. Credibility (validitas internal)

Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi, dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Menurut Moleong (2011: 330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Moleong (2011: 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut dicari titik temunya (fokus) yang menghubungkan diantara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder, observasi dan *interview*, sementara studi

dokumentasi digunakan untuk menjangkau data sekunder yang dapat diangkat dari berbagai dokumentasi.

Kemudian peneliti juga melakukan studi dokumentasi serta kepustakaan untuk melihat dan mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Tahap eksplorasi, tahap ini merupakan tahap pengumpulan data di lokasi penelitian, dengan melakukan wawancara dengan unsur-unsur yang terkait, dengan pedoman wawancara yang telah disediakan peneliti.

Triangulasi adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurut Muidjia (2014) triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Namun peneliti hanya menggunakan dua dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu : *Triangulasi Sumber Data* dan *Triangulasi Teori*

Triangulasi Sumber Data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

Triangulasi Teori yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, *triangulasi* teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

2. *Transferability (Validitas Eksternal)*

Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Dalam validitas eksternal menggunakan pengujian *Transferability*. *Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi tempat sampel penelitian diperoleh. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi yang lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung kepada pemakai. Kriteria transferabiliti merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer. Penelitian kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendiskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut.

Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, peneliti dalam membuat

laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca menjadi jelas dalam memahami hasil penelitian tersebut sehingga ia dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

Sebagai perbankan syariah pertama yang ada di Indonesia Bank Muamalat Indonesia memiliki beberapa sejarah singkat dari tahun ketahun yang menunjukkan perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun adapun sejarah singkat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahun 1991

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H.

- Pendiriannya digagas oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, serta pengusaha muslim dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia.
- Modal awal diperoleh dari sejumlah pribadi dan pengusaha muslim dengan nominal sebesar Rp84 miliar. Tambahan modal awal diperoleh dari masyarakat, sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp106 miliar.
- Acara pengumpulan modal dilakukan di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat.

b. Tahun 1992

Mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Sejak beroperasi, Bank Muamalat Indonesia telah menjadi pelopor bisnis keuangan syariah lainnya diantaranya:

1. Asuransi syariah pertama (Asuransi Takaful);
2. Memberikan bantuan teknis dan bantuan modal kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
3. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang kemudian mendirikan lebih dari 3.000 Baitulmaal wat Tamwil (BMT);
4. Beraliansi dengan Perum Pegadaian dalam pendirian pegadaian syariah;
5. Mendirikan Muamalat Institute (MI) untuk pengembangan, peningkatan dan penyebarluasan pengetahuan mengenai lembaga keuangan syariah;
6. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat);
7. Baitulmaal Muamalat (BMM) sebagai kepanjangan tangan Bank Muamalat Indonesia untuk pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), serta dana tanggung jawab sosial perusahaan Bank Muamalat Indonesia melalui program pengembangan usaha mikro.

c. Tahun 1993

Terdaftar sebagai perusahaan publik, namun belum *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI).

d. Tahun 1994

Bank Muamalat Indonesia Memperoleh izin sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994.

e. Tahun 1999

Pihak Bank Muamalat mengeluarkan penawaran umum terbatas (PUT) I dengan memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

f. Tahun 2003

1. Bank Muamalat mengeluarkan penawaran umum terbatas (PUT) II dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD)
2. Bank Muamalat Indonesia menerbitkan sukuk subordinasi mudharabah I sebesar 200 milyar dan merupakan sukuk pertama yang diterbitkan oleh lembaga perbankan di Indonesia

g. Tahun 2004

Bank Muamalat meluncurkan produk Shar-e yang merupakan tabungan instan pertama di Indonesia melalui ribuan jaringan online kantor pos diseluruh Indonesia, yakni System online payment point (SOPP)

h. Tahun 2005

Bank Muamalat mengeluarkan penawaran umum terbatas (PUT) III dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD)

i. Tahun 2007

Pendirian Al-Ijarah Indonesia Finnance (ALIF) bersama dengan Boubyan Bank dan international leasing and investment company (ILIC) sebagai perusahaan

Multifinance syariah pertama di Indonesia

j. Tahun 2008

Bank Muamalat menerbitkan sukuk subordinasi Mudharabah II sebesar Rp.314 Miliar

k. Tahun 2009

Pembukaan kantor cabang internasional pertama di Kuala Lumpur, Malaysia. Bank Muamalat Indonesia tercatat sebagai bank pertama di Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia

l. Tahun 2010

Bank Muamalat mengeluarkan penawaran umum terbatas (PUT) IV dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD)

m. Tahun 2011

Peluncuran produk Shar-E Gold Debit Visa yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diseluruh *merchant* VISA baik di dalam negeri maupun mancanegara. Produk ini mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia.

n. Tahun 2012

- Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* atau perubahan logo. *Ceremony* peresmian logo baru dilakukan bersamaan dengan perayaan ulang tahun Bank Muamalat Indonesia ke 20.

- Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I tahap 1 senilai Rp800 miliar.
- o. Tahun 2013
- Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
 - Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I tahap II senilai Rp700 miliar
- p. Tahun 2014
- Bank Muamalat memulai proses Transformasi dengan menajamkan Visi dan Misi
- q. Tahun 2015
- Peresmian Muamalat Tower sebagai kantor pusat Bank Muamalat Indonesia. Hal tersebut semakin memperkuat branding dan eksistensi Bank Muamalat Indonesia di Industri Perbankan Indonesia.
 - Meluncurkan produk *Bancassurance* Syariah pertama, Zafirah Save Link bersama dengan Manulife Indonesia

2. PROFIL PERUSAHAAN

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) didirikan pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta pengusaha muslim dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia PT BMI beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Sebagai bank syariah yang pertama di Indonesia, PT BMI

merupakan inisiator bisnis keuangan syariah lainnya, yaitu; Asuransi syariah pertama (Asuransi tafakul), Dana pensiun lembaga keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), multifinance syariah pertama (*Al-Ijarah Indonesia Finance*).

PT BMI mendapatkan izin sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994 dan merupakan perusahaan publik namun tidak *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Muamalat Indonesia telah melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah di tahun 2003.

Dalam melakukan ekspansi bisnisnya, selain membuka kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, PT BMI juga membuka kantor cabang internasional di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2009 dan tercatat sebagai bank pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia. PT BMI memiliki serangkaian produk dan layanan, antara lain; produk Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia, produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diseluruh merchant VISA dalam dan luar negeri yang mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*.

Bertepatan dengan ulang tahun yang ke-20, pada tahun 2012 PT BMI meluncurkan logo baru (*rebranding*) untuk menampilkan bank syariah yang Islami, Modern dan Profesional. Pelopor perbankan syariah yang telah menginjak usia 23 tahun ini telah mendapatkan pengakuan dan berbagai penghargaan baik dari dalam negeri maupun internasional pada Desember 2015, PT BMI memberikan layanan melalui 446 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia dan didukung oleh jaringan layanan 1.998 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil Kas Keliling (*mobile branch*) serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS) Bank Muamalat Indonesia juga memberikan layanan pembiayaan syariah melalui anak perusahaan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF), layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK Muamalat), layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui Baitul Maal Muamalat (BMM).

Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan untuk meningkatkan kinerja, PT BMI melakukan peninjauan visi dan misi perusahaan. Visi M10-Y25 merupakan bagian dari upaya Bank Muamalat Indonesia untuk mengarahkan perjalanan bisnis PT BMI hingga 10 tahun ke depan. Dengan telah menetapkan Visi dan Misi sampai dengan 10 tahun ke depan, akan lebih memudahkan PT BMI untuk melangkahkan kaki dan menyusun perencanaan untuk masa depan guna menyongsong masa depan yang semakin baik.

PT BMI memiliki serangkaian produk dan layanan antara lain; produk Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia, produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diseluruh merchant VISA dalam dan luar negeri yang mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. adapun visi dan misi Bank muamalat ialah :

3. VISI DAN MISI

Sebagai perusahaan yang bersifat going concern PT .Bank muamalat juga memiliki target yang ingin di capai nantinya, oleh sebab itu bank Muamalat mencanangkan visi dan misi perusahaan sebagai patokan dasar perusahaan, adapun visi dan misi dari PT. Bank Muamalat Indonesia ialah sebagai berikut:

a. Visi

Visi Bank Muamalat Indonesia adalah untuk menjadi ”Menjadi Bank Syariah Terbaik dan 10 Bank Terbesar di Indonesia dengan Kehadiran Regional yang Kuat”. Untuk mencapai visi tersebut akan dilakukan dalam tiga fase. Fase pertama akan dilakukan pada 2015-2017, fase kedua 2018-2020, dan fase terakhir akan dilakukan pada tahun 2021- 2025. Visi tersebut disingkat dengan “M10Y25” yang merupakan singkatan dari “Bank Muamalat Indonesia Top 10 Bank di Tahun 2025”.

b. Misi

Misi Bank Muamalat Indonesia adalah “Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.

Bertepatan dengan ulang tahun yang ke-20, pada tahun 2012 Bank Muamalat Indonesia meluncurkan logo baru (*rebranding*) untuk menampilkan bank syariah yang Islami, Modern dan Profesional. Pelopor perbankan syariah yang telah menginjak usia 23 tahun ini telah mendapatkan pengakuan dan berbagai penghargaan baik dari dalam negeri maupun internasional. Pada Desember 2015, Bank Muamalat Indonesia memberikan layanan melalui 446 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia dan didukung oleh jaringan layanan 1.998 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil Kas Keliling (*mobile branch*) serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). Bank Muamalat Indonesia juga memberikan layanan pembiayaan syariah melalui anak perusahaan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF), layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK Muamalat), layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui Baitulmaal Muamalat.

4. INFORMASI PERUSAHAAN

PT. Bank Muamalat Indonesia memiliki informasi yang berkaitan dengan gambaran umum perusahaan yaitu:

Tabel 4.1 Informasi perusahaan

Nama perusahaan	PT. Bank Muamalat Indonesia TBK
Bidang Usaha	Perbankan Syariah
Pendirian perusahaan	Didirikan pada 1 November 1991 Beroperasi 1mei 1992
Rating perusahaan	Id A+ dengan negatif outlook
Jaringan layanan	<ul style="list-style-type: none"> - 446 total kantor layanan - 84 kantor cabang - 266 kantor cabang pembantu - 96 kantor kas - 1998 Atm Muamalat - 103 mobile branch muamalat - 120.000jaringan Atm bersama dan BCA prima
Jaringan kantor ke luar negeri	Kantor cabang kuala lumpur Malaysia
Produk	1. Produk penghimpun dana <ul style="list-style-type: none"> - Giro ultima - Giro Attijary - Tabungan iB Muamalat

	<ul style="list-style-type: none"> - Tabungan iB Muamalat Dollar - Tabungan Muamalat iB haji dan Umrah - Tabungan iB Muamalat rencana - Tabunganku iB - Tabungan iB Muamalat Prima - Deposito Mudharabah - Dana pensiun Muamalat <p>2. Produk pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPR iB Muamalat - iB Muamalat Umroh - iB Muamalat Koperasi karyawan - iB Muamalat Multiguna - iB muamalat pensiun - iB Muamalat Konsumer duo - Pembiayaan Autoloan - iB modal kerja SME - iB rekening Koran Muamalat - iB Muamalat usaha mikro - iB property bisnis Muamalat - iB investasi SME
Jasa	<p>1. Jasa layanan internasional banking</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remittance - Trade finance - Forex iB - Investment service <p>2. Jasa layanan 24 jam</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATM Muamalat - SalaMuamalat - Muamalat Mobile Banking - Internet Banking - Cash Management system <p>3. Jasa-jasa lain</p>

Modal dasar	Rp.3.000.000.000.000
Modal di tempatkan dan disetor penuh	Rp.1.103.435.151.000
Dasar hukum pendirian	Akta nomor 1 tanggal 1 November 1991, dibuat di depan Notaris yudo paripurno SH.
Kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> - Islamic development bank (IDB) (32,74%) - Boubyan Bank (22,0%) - Atwill Holdings Limited (17,91%) - National bank of Kuwait (8,45%) - IDF Foundation (3,48%) - BMF Holdings Limited (2,84%) - M. Rizal Ismael (2,34%) - KOPKAPINDO (1,39%) - Andre Mirza Hartawan (1,18%) - Badan pengelola dana ONHI (1,03%) - Publik (6,64%)
Website	www.bankmuamalat.co.id

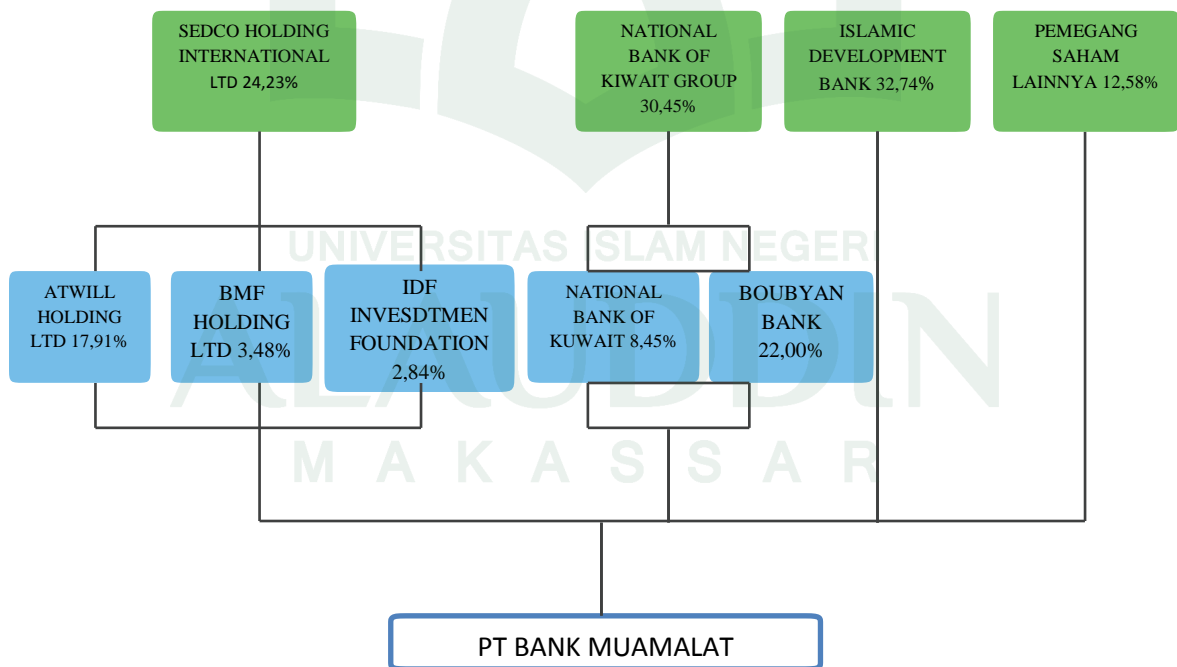
Sumber: *Annualy report* Bank Muamalat

Berdasarkan dari informasi umum diatas yang menjelaskan bahwa PT bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang di dirikan pada tanggal 1 novermber 1991 akan tetapi Bank Muamalat baru mulai beroperasi pada tanggal 1 mei 1992, sampai saat ini bank Muamalat Indonesia memiliki banyak jaringan layanan salah satunya bank muamalat Indonesia memiliki 84 kantor cabang utama yang salah satunya terdapat pada kota Makassar, Sulawesi selatan. Secara umum produk produk yang dikeluarkan oleh pihak bank muamalat ada 2 yaitu produk

penghimpunan dana dan produk pembiayaan, secara umum pendapatan dari pihak bank muamalat berasal dari produk tersebut. disamping mengeluarkan produk pihak bank muamalat juga memberikan fasilitas jasa kepada para nasabah untuk memudahkan para konsumen produk dari Bank Muamalat Indonesia.

Sejak terbentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia dengan memiliki modal awal sebesar tiga triliun rupiah sebagai dana operasional pertama yang digunakan untuk memenuhi fasilitas perusahaan, dan hingga saat ini ada beberapa pemilik modal pada bank muamalat Indonesia salah satunya adalah Islamic development bank sebagai pemilik modal terbesar. Adapun struktur pemegang saham pada PT Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur pemegang saham



Sumber: *Annualy report* Bank Muamalat

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Entitas PT BMI merupakan lembaga keuangan yang bertujuan melayani masyarakat di bidang keuangan. Kinerja PT BMI terdiri atas dua bagian penting yakni kinerja manajerial dan kinerja keuangan. Kinerja manajerial merupakan kemampuan seluruh jajaran karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan sedangkan Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam menjalankan bisnis sehingga dapata diketahui seberapa besar laba atau ruginya perusahaan tersebut. Kinerja keuangan inilah yang menyangkut kondisi keuangan Bank. Menurut Fahmi (2012:239) menyatakan “Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”. Jadi, kinerja keuangan perusahaan merupakan ukuran tingkat keberhasilan manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan standar yang ada. Pada dasarnya penilaian kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan serta menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangannya secara baik dan benar.

Kinerja keuangan sebagaimana sudah dijelaskan diatas juga berpendapat sama dengan Ikhwan sebagai *control operation* pada bank muamalat, bahwa:

“Untuk peningkatan kinerja keuangan pada Bank Muamalat dapat di ukur melalui perhitungan aset bank yang bertambah dalam kurun waktu satu periode, penambahan aset Bank dapat di lakukan seiring dengan pembukaan kantor cabang baru dari kota ke kota lainnya. Selain dari pada itu,

peningkatan aset keuangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan transaksi-transaksi yang sifatnya non tunai, seperti *mobile banking*, *Shord Massage Service Banking* (SMS Banking). Transaksi tunai atau melalui jaringan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di batasi pemakaiannya untuk wilayah publik selain efisiensi juga untuk mendidik nasabah menggunakan transaksi yang sifatnya non tunai, selain itu, untuk pihak Bank Muamalat sendiri dapat meminimalisir biaya-biaya operasional setiap penggunaannya.”

Berdasarkan pernyataan tersebut PT.BMI berusaha meningkatkan kinerja keuangannya melalui pengadaan aset-aset perusahaan diseluruh Indonesia dan pihak PT.BMI memalsimalkan penggunaan teknologi untuk mendidik para nasabah guna meminimalisir biaya oprasionalnya.. dilihat dari sisi kinerja keuangan Bank muamalat, menunjukkan hal yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan hal ini di buktikan dengan peningkatan *asset* dari Bank Muamalat itu sendiri.

b.1. Pendapatan Non Halal

Pendapatan Bank Muamalat tidak terlepas dari kinerja keuangan bank karena menghimpun penanaman modal serta cara mendapatkan profitabilitas. Untuk sumber pendapatan Bank Muamalat sendiri di sebutkan oleh Ikhwan sebagai *control operation* bahwa:

“Pendapatan yang diterima oleh pihak Bank Muamalat mutlak dari sistem pembiayaan atau sistem kredit dari biaya nasabah penabung. Berbeda dengan Bank konvensional yang memungut dari sistem bunga sedangkan Bank Muamalat menerapkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dapat dilakukan dengan sistem Murabaha dan Mudharabah.”

Murabahah merupakan perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin

keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari system murabahah yakni pendapatan dari hasil jual beli barang yang disediakan oleh pihak bank, seperti yang dipaparkan oleh Adiwarman (2004) bahwa Al-Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, misalkan pihak Bank menawarkan rumah kepada nasabah dengan *margin* sekian persen untuk pihak Bank sesuai kesepakatan nasabah dengan pihak bank. Untuk penanaman modal atau investasi bank dapat dilakukan dengan sistem mudharaba yakni sistem bagi hasil, pihak bank dapat membantu nasabah yang ingin melakukan usaha tetapi setiap bulannya bank mendapat *margin* sekian persen dari hasil usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan pihak Bank tentunya.

Ikhwan sebagai *control operation*, menjelaskan mengenai pendapatan bank muamalat bahwa:

“Pendapatan Bank Muamalat sampai pada saat ini, kami pastikan masih berbasis syariah. Bank Muamalat mengakui dan menjamin sumber Pendapatan dari pihak Bank Muamalat sampai pada saat ini masih berdasarkan pendapatan yang berbasis syariah, hal tersebut dikarenakan Bank Muamalat Indonesia hadir sebagai perbankan syariah di Indonesia pertama kalinya di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).”

Ikhwan kembali menjelaskan bahwa:

“Setiap transaksi yang dilakukan oleh bank muamalat harus sesuai dengan fatwa-fatwa MUI maka dari itu untuk mengeluarkan seluruh produk, baik produk pembiayaan maupun produk permodalan diwajibkan menkonsultasikan terlebih dahulu kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) dari MUI, setelah fatwa dikeluarkan oleh MUI maka pihak Bank diberikan kewenangan mengeluarkan produk tersebut kepada nasabah maupun masyarakat.”

Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan sistem bunga atas pembiayaan, Ikhwan mengungkapkan bahwa: secara prinsipnya pembiayaan pada Bank Muamalat maupun prinsip syariah pada umumnya di haramkan adanya bunga atas pinjaman nasabah. menurut Ikhwan yang kemudian kembali menjelaskan bahwa:

“Untuk menutupi pendapatan bunga atas pinjaman nasabah seperti pada bank konvensional, pendapatan bank muamalat di dapatkan dari akad itu sendiri.

Pernyataan tersebut dianggap menguatkan pendapat dari Mu'allim (2003) yang menyatakan bahwa bank-bank syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya ternyata bukan meniadakan bunga dan membagi resiko, namun tetap mempertahankan praktik pembebanan bunga serta menghindari resiko dengan cara yang licik.

Contohnya akad *murabahah* yakni pendapatan dari akad *murabahah* berasal dari margin yang ditetapkan sekian persen di dapatkan dari hasil jual beli. Maupun *mudharabah* yakni pendapatan yang di peroleh akad berasal dari sistem bagi hasil yang persentasi marginnya di tentukan oleh pihak bank tanpa membagi resiko dengan pihak nasabah apabila pihak bank sebagai pengelola mengalami kerugian. Hal tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Syariah Enterprise Theory yaitu nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggung jawaban, bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah. Akan tetapi pihak Bank Muamalat mengakui sumber pendapatan masih berbasis syariah. Dengan adanya penetapan persentasi margin dari bagi hasil yang dilakukan oleh bank muamalat terkesan seperti dipaksakan agar bagi hasil yang di setuju itu sesuai dengan tingkat margin yang di

tetapkan pada saat melakukan akad.

Berdasarkan sistem perbankan secara umum yang berlaku di Indonesia masih mengarah kepada bank konvensional, untuk giro atau simpanan dana bank muamalat masih mengacu kepada kebijakan bank sentral Indonesia (BI), akan tetapi terjadi pemisahan giro wajib minimum antara bank konvensional dengan bank syariah atau bank muamalat itu sendiri. Bank konvensional tetap dengan sistem bunganya sedangkan bank muamalat tetap juga dengan sistem mudharabahnyanya atau sistem bagi hasilnya yang biasa disebut dengan wadiah. Selain tabungan Giro di BI, bank muamalat juga menempatkan Giro pada Bank lain apabila pihak Bank Muamalat memiliki kelebihan dana. akan tetapi secara prinsipnya giro merupakan suatu produk bank dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga, biasanya suku bunga giro terbilang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tabungan dan deposito, hal tersebut dikarenakan simpanan giro dapat sewaktu-waktu diambil atau ditarik sampai ke batas akhir limit yang sudah ditentukan oleh pihak bank.

Berbicara mengenai investasi semua akad musyarakah dan mudharabah terhitung sebagai investasi. Akan tetapi, jika dikatakan bahwa Bank Muamalat memiliki investasi di badan usaha entitas lain, tidak ada sama sekali karena Bank Muamalat tidak seperti dengan bank konvensional yang memiliki badan usaha sendiri dan menanam modal pada usahanya sendiri.

Menurut pendapat Ikhwan yang menyatakan Pendapatan non halal dapat dijumpai dengan berbagai macam cara:

“Salah satunya dengan menanamkan modal pada entitas pada badan usahanya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.”

Seperti yang dipaparkan oleh Sahroni (2014) bahwa hukum harta non halal bisa disimpulkan, bahwa setiap pendapatan dari usaha- usaha yang tidak berdasarkan syariat islam bisa dikatakan diharamkan. Pendapatan yang dimaksud adalah :

- a. Bunga atas transaksi pinjaman
- b. Pendapatan dari usaha yang aktifitas pinjaman berbunga lebih dominan
- c. Pendapatan dari usaha perjudian, minuman keras, barang merusak moral dan mudharat.

Dari pernyataan dan pembahasan mengenai pendapatan non halal, Siti jalinar sebagai nasabah penabung mengatakan:

“Pendapatan non halal itu merupakan pendapatan yang di dapatkan melalui jalan yang tidak halal seperti uang yang di dapat dari hasil mencuri dan menipu orang lain”

Sejalan dengan itu nurul cahya yang mengatakan bahwa

” pendapatn non halal merupakan pendapatan yang di hasilkan melalui usaha yang tidak halal seperti pendapatan yang berasal dari perjudian.”

Pembahasan masalah pendapatan non halal juga sudah di sampaikan oleh Rasulullah Muhammad Saw dalam sebuah hadis riwayat sebagai berikut:

بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْهَمْدَانِيُّ نُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مُحَمَّدٍ دَنَا النُّعْمَانُ وَأَهْوَى يَقُولُ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ- اللَّهُ صَلَّى -اللَّهُ رَسُولٌ سَمِعْتُ يَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ بَشِيرٍ مِنْ كَثِيرٍ يَعْلَمُهُنَّ لَا مُشْتَبِهَاتٍ وَبَيْنَهُمَا بَيِّنُ الْحَرَامِ وَإِنَّ بَيِّنَ الْحَلَالِ إِنَّ « أَذْنِيهِ إِلَى بِاصْبَعِيهِ كَالرَّاعِي الْحَرَامِ فِي وَقَعِ الشُّبُهَاتِ فِي وَقَعِ وَمَنْ وَعِزُّهُ لِدِينِهِ اسْتَبْرَأَ الشُّبُهَاتِ اتَّقَى فَمَنْ النَّاسِ أَلَا مَحَارِمُهُ اللَّهُ حَمَى وَإِنَّ أَلَا حَمَى مَلِكٌ لِكُلِّ وَإِنَّ أَلَا فِيهِ يَرْتَعُ أَنْ يُوشِكُ الْحَمَى حَوْلَ يَرْعَى الْقَلْبُ وَهِيَ أَلَا كُلُّهُ الْجَسَدُ فَسَدَ فَسَدَتْ وَإِذَا كُلُّهُ الْجَسَدُ صَلَحَ صَلَحَتْ إِذَا مُضْغَةً الْجَسَدِ فِي وَإِنَّ (اِخْدَالَ حَلَالٍ وَتَرْكَالَ شُبُهَاتٍ بِأَبٍ ، مَسْلَمٌ صَدِيجُ) .»

Terjemahnya:

Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani dari Ayahku dari Zakaria dan Sya'yi dari Nu'man bin Basyir berkata sara mendengar Rasulullah SAW bersabda dengan membisikkan kepada telinga Nu'man "Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram jelas, dan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat tersebut, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia jatuh pada hal yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, lambat laun akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah setiap raja memiliki memiliki daerah larangan, sedangkan daerah larangan allah adalah apa-apa yang diharamkanNYA. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, apabila dia baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah dia adalah hati" (dana-non-halal.html)

Berdasarkan pendapat dan pernyataan juga hadist riwayat diatas yang menjelaskan tentang pendapatan non halal yang memang semestinya dihindari baik untuk perseorangan maupun untuk perusahaan yang berlebelkan islam. Sebab pendapatan non halal yang di peroleh seseorang maupun perusahaan tersebut sudah jelas tidak diperbolehkan oleh syariat islam. Pendapatan yang dimaksud pendapatan non halal merupakan pendapatan yang berasal dari usaha ataupun pekerjaan yang tidak mempunyai kesesuaian dengan aturan dan syariat islam. Adapun juga pendapatan non halal dapat di temukan pada jenis usaha dan pekerjaan yang halal namun pada proses pelaksanaan dan objek pekerjaan tidak sesuai dengan khaidah-khaidah islam. Dan penggunaan dari pendapatan non halal tersebut tidak di perbolehkan untuk digunakan untuk kepentingan diri sendiri ataupun perusahaan. Dalam lingkup usaha dan perbankan syariah, pengakuan pendapatan non halal ini harus memiliki pencatatan yang terpisah pada pelaporan keuangannya.

Maka dari itu untuk menghilangkan adanya unsur pendapatan non halal pada PT.BMI Ikhwan sebagai *control operation*, menyatakan bahwa:

“Sebelum pihak Bank Muamalat melakukan investasi perlu dilakukan seleksi terlebih dahulu atas badan usaha maupun produk-produk Bank Muamalat yang dijalankannya dan jika tidak sesuai dengan prinsip syariah islam maka pihak Bank Muamalat tak menerimanya.”

Menurut pihak Bank Muamalat dapat disimpulkan bahwa pendapatan non halal atas transaksi tidak ada sejak berdirinya Bank Muamalat. Akan tetapi pada dasarnya, proses penyeleksian tersebut bank muamalat memiliki kendala untuk mengidentifikasi pendapatan yang halal dan yang non halal di karenakan pihak Bank Muamalat tidak meminta dokumen-dokumen baik personal maupun badan usaha yang di jalankan oleh calon nasabah Bank melainkan butuh kejujuran dari nasabah itu sendiri agar dengan sendirinya Bank muamalat dapat memberikan pelayanan prima terhadap nasabah.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, Ikwan kembali Menyatakan bahwa:

“Secara umum pihak Bank Muamalat tidak membatasi nasabah secara ras, suku dan agama, siapapun ingin menabung atau bekerja sama dengan Bank Muamalat akan dilayani.”

Kembali dapat disimpulkan bahwasanya Sebagai salah satu perbankan syariah terbesar di Indonesia, sudah semestinya Bank Muamalat hanya melayani masyarakat yang notabenenya hanya beragama islam saja tidak dengan non agama islam ,agar dana yang masuk dari penbung bisa jelas berasal dari pendapatan yang halal guna menjaga kepercayaan nasabah. Akan tetapi Bank Muamalat sebagai perusahaan yang melayani masyarakat umum sehinggan Bank Muamalat membuka

mitra kerja sama dengan nasabah yang berasal dari agama lain selain dari agama islam. Satu hal yang perlu di perhatikan dan tidak terlepas dari proses pengkreditan bank muamalat tetap menggunakan prinsip-prinsip syariah pada umumnya. Bank Muamalat membuka ruang kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali tapi tetap menggunakan prinsip murabahah dan musyarakah untuk mengelola dana dari masyarakat, jadi prinsip syariah itu yang membedakan Bank Muamalat dengan bank konvensional. Sama halnya dengan perbankan yang bersifat konvensional nasabah yang ingin menabung di Bank Muamalat terlebih dahulu melalui proses wawancara calon nasabah,

Seperti yang di paparkan oleh ikhwan sebagai *control operating* pada Bank Muamalat bahwa:

“Dalam dunia perbankan mengenal *system Costumer Service Form* (CIF), di dalam *system Costumer Service* .dalam CIF ini calon nasabah menuliskan seluruh informasi, baik personal atau badan usaha yang dijalankannya, system ini adalah ketentuan dari BI bahwa seluruh Bank diwajibkan untuk mengidentifikasi seluruh calon nasabahnya”.

Akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa dana tersebut dapat dikatakan dana halal sebab nasabah bisa saja memanipulasi asal dana yang di simpan atau dana di pinjam . Sebab apabila dana halal bercampur dengan dana non halal maka secara sifatnya dana tersebut bisa di kategorikan sebagai dana non halal dan pendapatan dari pengelolaan dana non halal tersebut di katrgorikan sebagai pendapatan non halal.

Menurut Ikhwan *control operation*, kembali mengatakan bahwa:

“Apabila ada calon nasabah yang pendapatannya berasal dari sumber yang diharamkan oleh agama islam seperti, pendapatan dari ternak babi atau dari penjualan minuman haram maka perbankan syariah tidak melayani akan hal itu termasuk Bank Muamalat ini. Pihak kami mengakui bahwa dalam proses pengidenifikasian pendapatan dari calon nasabah sangat sulit untuk diidentifikasi halal atau haramnya pendapatan nasabah tersebut, sebab untuk mengetahui halal atau haramnya, nasabah sendiri yang harus akui,

Pada proses inilah perbankan syariah sebenarnya dapat kecolongan akan adanya dana non halal, secara perbankan syariah atau Bank muamalat tidak seharusnya mengelola dana non halal..

Bank Muamalat membuka mitra kerja sama dengan pihak Bank lain, baik bank syariah maupun konvensional, Menurut Ikhwan Apabila bank muamalat memiliki kelebihan dana maka pihak Bank Muamalat titipkan atau menempatkan dana tersebut di bank lain. Jika bank muamalat menempatkan dana di bank konvensional maka secara otomatis mendapatkan bunga atau dana kebajikan atas penempatan dana tersebut, tetapi pihak Bank Muamalat tidak mengakuinya sebagai pendapatan dan tidak di masukkan dalam laporan laba rugi, sedangkan swcara harfiah apabila ada hal lain berupa dana yang tidak jelas sumbernya maka di lakukan pemisahan dalam laopran keuangan Bank, untuk dana non halal atau dana kebajikan yang diterima oleh pihak bank Muamalat disalurkan ke lembaga sayap Bank Muamalat yakni Baitul Mal untuk selanjutnya diperuntukkan bagi pembangunan infarstruktur sosial atau yang berhak menerima sebagai bentuk sadaqakah sebagai salah satu bentuk pembangunan masyarakat, jadi pihak bank Muamalat tidak mengakui itu sebagai pendapatan.akan tetapi penggunaan dari dana yang bersifat non

halal atau bunga yang di peroleh tidak diperbolehkan sesuai dengan Standar Syariah AAOIFI yang didalamnya menyebutkan bahwa Pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupun dengan cara hilah ribawiyah seperti digunakan untuk membayar pajak.

b.2. Reputasi dan kepercayaan nasabah Bank Muamalat Indonesia

Mesawa dan Almosawwi (1998) menyatakan bahwa faktor utama nasabah mempertahankan hubungannya atau tetap loyal pada bank syariah adalah ketaatan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Nasabah memutuskan untuk tetap mempertahankan bank syariah berkaitan dengan masalah keimanan dan keyakinan terhadap pengharaman riba bagi umat Islam. Dalam pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, salah satu penyebab rendahnya reputasi bank syariah. Reputasi dalam jangka panjang berakibat pada kepercayaan pada bank syariah.

Menurut Wardayati (2011) Reputasi memegang peran yang penting dalam menjalin hubungan kerjasama antar bank syariah dengan nasabah. Reputasi menjadi dasar penilaian dalam menentukan apakah suatu bank syariah layak

untuk dijadikan mitra kerjasama oleh nasabah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ganesan menemukan pengaruh positif antara reputasi dengan kepercayaan yang pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya hubungan kemitraan untuk jangka panjang. reputasi berhubungan dengan kepercayaan. Sedangkan kepercayaan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun hubungan kemitraan antar bank syariah dengan nasabah.

Menurut Ikhwan sebagai *control operation* bahwa

“Kepercayaan nasabah Bank Muamalat dapat ditingkatkan dengan pelayanan yang maksimal dari Bank Muamalat, pelayanan ini dapat dilakukan seiring dengan perbaikan infrastruktur disetiap cabang serta pelayanan disetiap transaksi yang terjadi, bukan hanya infrastruktur, sumber daya manusia yang mempunyai bidang perbankan juga menjadi pendukung dalam peningkatan kepercayaan nasabah Bank Muamalat, dua hal tersebut sangat berpengaruh signifikan untuk menarik kepercayaan nasabah untuk turut membantu dalam perkembangan bank muamalat sehingga dapat mencapai visi-misi sebagai perbankan syariah terbesar dan termasuk dalam 10 besar Bank yang paling berpengaruh di dunia perbankan khususnya di Negara Indonesia.”

Menurut Haikal Sumarjan sebagai nasabah tabungan haji pada Bank Muamalat yang mengungkapkan tentang alasannya untuk menjadi nasabah pada bank muamalat

“ Saya memilih PT bank Muamalat Indonesia, disebabkan oleh adanya penawaran produk keuangan berupa tabungan haji oleh pihak bank muamalat, selain itu beliau juga menyebutkan bahwa bank muamalat merupakan bank syariah yang memiliki nama yang baik dalam bidang perbankan syariah”.

. Berbeda dengan Nurul cahya sebagai nasabah tabungan haji yang menyatakan bahwa:

“Bank Muamalat memiliki system yang bisa di percaya, sebagai bank syariah yang mengedepankan prinsip prinsip islam, akan tetapi secara praktek pihak

bank Muamalat hampir tidak jauh berbeda dengan transaksi pada bank konvensional”.

Disisi lain Siti Jalinar sebagai nasabah penabung yang menyatakan tentang alasannya menabung pada bank Muamalat bahwa:

“Bank muamalat saya pilih sebagai bank untuk menyimpan dana disebabkan oleh tingginya tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak bank muamalat Indonesia, oleh karena itu saya berminat untuk menginvestasikan dananya pada bank muamalat Indonesia. Juga dinyatakan olehnya akan tetapi apabila tingkat bagi hasil pada bank muamalat menurun saya tidak segan- segan untuk menarik dana yang disimpan pada bank muamalat dan di tempatkan pada bank lain yang punya tawaran yang lebih baik”

Berdasarkan dari pernyataan-pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa para nasabah tersebut memiliki kepercayaan yang tinggi kepada bank Muamalat yang didasari oleh reputasi dan kinerja Bank Muamalat. Akan tetapi setelah peneliti memberi tahukan bahwa dana yang terdapat pada Bank muamalat tidak seratus persen dana halal pendapatan yang diperoleh itu merupakan termasuk dalam bagian pendapatan non halal, sebagai nasabah penabung, merasa sedikit kecewa setelah mengetahui akan hal tersebut, tetapi kemudian untuk tidak menerima atau berhenti itu butuh proses yang panjang baginya, setidaknya sebagai nasabah penabung dia sudah mengetahui. disini tingkat kepercayaanya sebagai nasabah penabung dinilai menurun karena adanya rasa kekecewaan yang dinyatakan oleh Siti Jalinar sebagai nasabah penabung. Pernyataan beliau yang menyatakan bahwa:

“Saya kira bank muamalat merupakan bank syariah yang namanya besar di masyarakat, akan tetapi setelah mendengar hal tersebut saya menjadi sedikit kecewa dengan adanya pendapatan non halal pada bank muamalat, dan bisa jadi dana yang saya masukkan terkontaminasi dengan dana non halal tersebut”.

Hal senada juga di sampaikan oleh nurul cahya sebagai nasabah tabungan haji yang mengatakan

“Berarti dana yang saya simpan untuk menunaikan ibadah haji itu bisa saja terkontaminasi dengan dana non halal tersebut, yah kalau di bilang kecewa sudah pasti kecewa, karena saya punya niat baik untuk menunaikan ibadah haji yang menurut saya dana yang kami kumpulkan itu berasal dari jerih payah kami dan sifatnya halal”

Ditinjau dari pernyataan nasabah bank Muamalat diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pendapatan non halal pada bank Muamalat mempengaruhi tingkat kepercayaan dari para nasabah yang awalnya tingkat kepercayaan dari nasabah tinggi menjadi menurun, aspek kepercayaan sangat penting dalam menentukan keberlangsungan suatu bank, baik itu kepercayaan dari penabung maupun kepercayaan pada kreditur lainnya. Aspek kepercayaan tersebut dipengaruhi oleh :

1. Sifat/perilaku manusia yang cenderung tidak mau ambil resiko, cenderung reaktif dan panik apabila mendengar berita buruk.
2. Adanya ketidakseimbangan penyaluran informasi antara nasabah dan pengelola bank tentang kondisi bank yang sebenarnya.

kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari orang lain. Sebagai aspek penunjang kepercayaan, reputasi merupakan suatu nilai yang diberikan kepada individu, institusi atau Negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Reputasi baru dapat bertahan dan sustainable apabila

adanya konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Reputasi yang kokoh (*solid reputation*) terbentuk melalui identitas organisasi yang khas, proyeksi citra-citra publik yang konsisten dan komunikasi persuasif yang positif pada segenap jenis konstituensi. Singkat kata reputasi merupakan kristalisasi dari citra yang dibangun oleh masyarakat berdasarkan pengalaman langsung ataupun tidak langsung dan kinerja organisasi. Reputasi mencerminkan persepsi publik terkait mengenai tindakan-tindakan organisasi yang telah berlalu dan prospek organisasi dimasa datang ([http:// muafiq center.blog](http://muafiqcenter.blog))

Reputasi atau citra didefinisikan sebagai *a picture of mind*, yaitu suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang. Citra dapat berubah menjadi buruk atau negatif, apabila kemudian ternyata tidak didukung oleh kemampuan atau keadaan yang sebenarnya. Tingkat kepercayaan dari nasabah Bank Muamalat dinilai dapat mempengaruhi tingkat reputasi dari Bank Muamalat, dan dengan adanya kekecewaan nasabah bank muamalat yang disebabkan oleh pendapatan non halal yang terdapat pada dana bank muamalat itu sendiri dinilai dapat mempengaruhi tingkat reputasi Bank Muamalat itu sendiri,

kepercayaan juga dibahas dalam surah ali Imran ayat 118 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَّا عَنْتُمْ قَدْ
 بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِّنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَةَ إِن كُنتُمْ

تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya”. (Departemen Agama, 1989)

Penjelasan tentang ayat diatas adalah tentang kepercayaan kepada orang lain, yang dimana pada ayat tersebut tersirat bahwa kepercayaan dapat diberikan kepada orang yang dapat dipercaya saja sebab kepercayaan yang dapat diberikan kepada pihak yang tidak tepat akan menimbulkan kekecewaan yang memicu kemudharatan bagi diri kita sendiri

Berdasarkan dari beberapa pernyataan dan landasan ayat Al-Quran dapat ditarik proposisi bahwa kepercayaan sebagai dampak dari reputasi seseorang atau perusahaan merupakan sebuah wilayah non fisik yang beranggapan sebagai pengakuan terhadap sesuatu ataupun seseorang. Dalam ranah islam kepercayaan juga di sebut amanah. Oleh karena itu urgensi kepercayaan dalam hidup sosial dan bisnis sangat di perlukan guna menjaga citra dan nama baik seseorang maupun perusahaan. Sebab dalam dunia usaha pengakuan yang di berikan oleh pihak lain bisa menjadi modal untuk kelangsungan hidup perusahaan. akan tetapi kepercayaan yang diberikan juga harus dijaga dengan baik. sebab dengan menjaga kepercayaan seseorang dapat membuat orang lain cenderung ikut percaya terhadap perusahaan. Dalam islam pun diwajibkan untuk memiliki sifat amanah yaitu dapat di percaya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pendapatan non halal yang terdapat pada PT. Bank Muamalat Indonesia serta menjelaskan bagaimana dampak adanya dan penggunaannya pendapatan non halal pada Bank Muamalat itu sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. pendapatan non halal Sudah semestinya di hindari baik untuk perseorangan maupun untuk perusahaan yang berlebelkan islam. Sebab pendapatan non halal yang di peroleh seseorang maupun perusahaan tersebut sudah jelas tidak diperbolehkan oleh syariat islam. Pendapatan yang dimaksud pendapatan non halal merupakan pendapatan yang berasal dari usaha ataupun pekerjaan yang tidak mempunyai kesesuaian dengan aturan dan syariat islam. Adapun juga pendapatan non halal dapat di temukan pada jenis usaha dan pekerjaan yang halal namun pada proses pelaksanaan dan objek pekerjaan tidak sesuai dengan khaidah-khaidah islam. Dan penggunaan dari pendapatan non halal tersebut tidak di perbolehkan untuk digunakan untuk kepentingan diri sendiri ataupun perusahaan. Dalam hal ini bentuk pendapatan non halal yang terdapat pada bank muamalat

Indonesia berupa pendapatan yang berasal dari giro yang disimpan pada bank lain, walaupun menurut informan yang mengatakan bahwa pendapatan Bunga yang berasal dari giro pada bank lain itu tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi dan tidak diakui sebagai pendapatan. Akan tetapi tidak mengurangi keberadaan pendapatan giro tersebut sebagai pendapatan non halal dan seharusnya dibuatkan pelaporan keuangan yang terpisah

2. Kepercayaan sebagai dampak dari reputasi seseorang atau perusahaan merupakan sebuah wilayah non fisik yang beranggapan sebagai pengakuan terhadap sesuatu ataupun seseorang. Dalam ranah islam kepercayaan juga di sebut amanah. Oleh karena itu urgensi kepercayaan dalam hidup sosial dan bisnis sangat di perlukan guna menjaga citra dan nama baik seseorang maupun perusahaan. Sebab dalam dunia usaha pengakuan yang di berikan oleh pihak lain bisa menjadi modal untuk kelangsungan hidup perusahaan. akan tetapi kepercayaan yang diberikan juga harus dijaga dengan baik. sebab dengan menjaga kepercayaan seseorang dapat membuat orang lain cenderung ikut percaya terhadap perusahaan. Dalam islam pun diwajibkan untuk memiliki sifat amanah yaitu dapat di percaya. sehingga dapat dipercaya juga memerlukan bukti nyata yang dapat di saksikan oleh orang lain. Aspek kepercayaan sangat penting dalam menentukan tingkat keberlangsungan suatu bank, dimana bentuk kepercayaan pada nasabah bank muamalat sangat

mempengaruhi tingkat reputasi dari perusahaan itu sendiri. Adapun tingkat kepercayaan dari bank muamalat yang dilihat dari informan yang baru mengetahui bahwa adanya pendapatan non halal pada bank muamalat menurunkan tingkat kepercayaan nasabah yang disebabkan oleh tingkat kekecewaan nasabah penabung, dan dengan menurunnya tingkat kepercayaan nasabah Bank Muamalat dapat mempengaruhi tingkat reputasi dari Bank Muamalat itu sendiri

B. IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan pada pembahasan diatas.

Implikasi penelitian yang diberikan berupa saran yaitu :

1. Bank Muamalat diharapkan dapat memisahkan pelaporan pendapatan non halal yang ada pada laporan keuangan, sehingga dapat di jadikan contoh untuk pelaporan keuangan pada entitas syariah lainnya.
2. Bank muamalat diharapkan bisa meminimalisir beberapa sumber pendapatan non halal yang berpotensi menurunkan tingkat reputasi dan kepercayaan bank muamalat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman ,A.Karim (2004), ”*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* “Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Alim, Muhammad Nizarul (2011). “*Muhasabah Keuangan Syariah*”.Aqwa Solo
- Al-Quran, (1989) Departemen Agama Republik Indonesia., “Al-Quran dan Terjemahan . Jakarta.
- Annually Report PT. Bank Muamalat Indonesia (2015)
- Antonio, Muhammad Syafei (1999), “*Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*” Jakarta: Tazkia Institute, , hlm 12.
- Ardhaningsih, Ghaniey Septian (2012),” *Sharia Compliance Akad Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng*”, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2012
- Ardian, Nizar Krisna. (2015). “*Pengungkapan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia*”. (Online) : h. 1-32
- Chapra, M.U.dan Habib Ahmed. (2002) “*Corporate Governance in Islamic Financial Institutions.*” Occasional Paper No. 6, (Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank, Jeddah, hlm 12-13.
- Creswell, J. W. (2007). “*Qualitative Inquiry and Re- search Design: Choosing Among Five Approach*”. USA: Sage Publication, Inc.
- Dewan Syariah NAS MUI (2006) “*Himpunan Fatwa Dwan Syariah Nasional*” EdisiRevisi 2006, Jakarta, Diterbitkanataskerjasama DSN – Bank Indonesia, Cet. 2006 hal. 274
- Djaelani,Aunu rofiq (2013). “*Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif*” VOL : XX, NO : 1, MARET 2013
- Efferin. S, S. H. Darmadji, Y.Tan. (2004). “*Metode Penelitan Untuk Akuntansi. Sebuah Pendekatan Praktis*”.Malang: Bayumedia Publishing
- Fahmi, Irham. (2013).” *Analisis Laporan Keuangan*”. Bandung: Alfabeta
- Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), hlm. 40

- Hisamuddin, Nur dan Iva Sholikha (2014), " *Persepsi, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang*" ZISWAF, Vol.1, No.1, Juni 2014, Jember
- Ilhami, Haniah. (2009). " *Pertanggung jawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*". Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 21, No. 03 (Oktober): h. 409-628.
- Indriantoro, Nur. Bambang Supomo. (2013), " *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*". Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. 2013
- Jatmiko, I. (2011). " *Kajian Citra Perusahaan Melalui Kegiatan Corporate Social Responsibility pada Bank "X" Bogor*". Skripsi Program Sarjana Alih Jenis Manajemen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Judisseno, K. Rinsky. (2005). *Sistem moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kasmir. (2008). " *Pemasaran Bank*". Jakarta: Kencana
- Lau, G. T. dan Lee, S. H. (1999). " *Consumers' Trust in a Brand and The Link to Brand Loyalty*". *Journal of Market Focused Management*, vol 4, pp 341-370.
- Machmud, Amir dan Rukmana (2010)., *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Study Empiris di Indonesia* Jakarta: Penerbit Erlangga,
- Metawa, S.A. & Almossawi, M., (1998) " *Banking Behavior of Islamic Bank Customers: Perspectives and Implications*," The International Journal of Bank Marketing, Vol. 16 1998 (7), pp. 299-313
- Meutia, Inten. 2010. " *Shariah Enterprise Theory sebagai Dasar Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial untuk Bank Syariah*". Disertasi Tidak Dipublikasikan, Doktor Ilmu Akuntansi Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya.
- Minarni. (2013). " *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*". La_Riba. Jurnal Ekonomi Islam. Volume V No 1. Juli 2013
- Mu'allim, Amir. (2003). " *Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah*". Al-Marawid., Edisi X: 17-31.
- Mustofa, Ubaedul. (2015). " *Peran Pengawasan, Model pengorganisasian Dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah (Shari'a Compliance)*", : h, 1-59

- Paranoan, Natalia. (2015), "*Riset non positivistik Akuntansi dalam tiga paradigm: Interpretif, Kritis dan Posmodernisme*", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 10. No. 1, Januari 2015
- Qordhawi, Yusuf, (1997). "*Norma dan Etika Ekonomi Islam*", : Gema Insani Perss, Jakarta
- Rosidah, C. (2011). "*The Influence of Corporate Reputation and Trust To Consumer Loyalty of ATM Users After Cybercrime Issues (Study at BCA Consumers in Surabaya)*". Jurnal Business and Economics
- Roziq, ahmad dan widya yanti (2012), "*tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan lembaga amil zakat*", Jurnal Akuntansi Universitas Jember
- Saeful Rahmat, Pupu. "*Jurnal Penelitian*". EQUILIBRIUM, Vol. 5, No.9, [anuari - [uni 2009: 1- 8
- Salehodin, dkk. (2014). "*Ahsan kah Pendapatan non halal pada Qhardul hasan*", SNAS, h.64-80
- Sudarwin Danim. (2002). "*Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancangan Metodologi, presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan humaniora*". Bandung: Penerbit Pustaka Setia hal 31
- Suharsimi, Arikunto. (2010). *Manajemen penelitian*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Sukardi, Budi. "*Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia*". Artikel tidak dipublikasikan.
- Sula, Atik Emilia, dkk. (2014). "*Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah*". JAFFA. Vol. 02, No. 2 (Oktober): h. 91-100.
- Suprayogi, Noven. (2013). "*Menyingkap Shari'a Compliance Bank Syariah Dari Laporan Keuangan*" (Online). (<http://novensuprayogi.blogspot.com/>, diakses 7 Oktober 2013).
- Syafei, Ade wirman. dan Jumansyah (2013). "*Analisis penerapan Good Governance Bussiness Syariah dan pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia*". Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, Vol . 2, No. 1, Maret 2013
- Sahroni, Oni. (2014). "*Pemasukan dana non halal di Lembaga keuangan Syariah (LKS) dalam perspektif Syariah*". Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke-8 MCSN8, 28-29 Mei 2014

Sugiyono. (2009). “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Alfabeta

Trimanah (2012). “*Reputasi dalam kerangka kerja public relation*”s. Jurnal Ilmiah Komunikasi | MAKNA Vol. 3 No. 1, Februari – Juli 2012

Triyuwono, Iwan. 2012.” *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori*”. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Usman, Rachmadi (2012),” *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*” Jakarta: Sinar Grafika,.

Usnah, Siti Asmaul. (2015).” *Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah Di Bank Syariah*”. JESTT. Vol. 2, No. 2 (Februari): h. 147-161.

Wahyuni,Endang Tri (2011).”*Pengaruh kepercayaan dan kepuasan terhadap loyalitas nasabah Perbankan Syariah*”. Jurnal Manajemen perbankan vol. 3 . 4

Wardayati, Siti Maria. (2011). “*Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*”. Walisongo. (Online). Vol. 19, No. 1 (Mei): 1-24.

Wardayati,Sitti Maria.(2011), “*Implikasi Shariah Governance terhadap reputasi dan kepercayaan bank Syariah*” Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011

Wibisono, Andri. (2012), “*Analisis kinerja pada PT. Bank Muamalat Indonesia,TBKperiode 2005-2009*” Jurnal Administrasi Bisnis Volume I Nomor 1 September 2012

Yuliza,dan Raina,Linda sari (2013) “Analisis tingkat kepercayaan pada nasabah bank umum pasca kasus century” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1 No.5, April 2013*

<http://muwafikcenter.blogspot.co.id/2009/10/psc6-citra-reputasi.html> diakses pada 12 maret 2017

<http://makalah-perkuliah.blogspot.co.id/2012/11/dana-non-halal.html> diakses pada 15 juni 2017

RIWAYAT HIDUP



Huzain Sholeh Utomo Lahir di Ujung Pandang tanggal 20 November 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan anak ke dua dari dua bersaudara yang berasal dari pasangan (Alm) Muslimin Tammin dan St. Jalinar Abdullah

Tahun 1999 memulai pendidikan dasar di SD. Sudirman 1 kota Makassar, dan lulus pada tahun 2005. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah pertama di SMPN.23 Makassar dan lulus pada tahun 2008, dan melanjutkan pendidikan menengah di SMAN.12 Makassar dan lulus pada tahun 2011.

Masuk perguruan tinggi pada tahun 2011 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melalui jalur Ujian Masuk Lokal (UML), setelah menempuh pendidikan tinggi pada UIN Alauddin Makassar dan di awal tahun 2017 dapat menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi.